

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia yang pesat menuntut identifikasi permasalahan dalam disiplin Hubungan Internasional untuk terus mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam membangun pendekatan studi interpersonal. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran media massa dalam diskursus politik global dan isu-isu kenegaraan. Adapun dengan pergerakan dunia yang dinamis, masyarakat dituntut untuk mengkonsumsi berita setiap harinya. Hal ini menjadikan aspek media dengan politik internasional menjadi dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, lantaran keduanya saling berkelindan dalam menentukan arah perubahan di masyarakat (Adrianti, 2015). Sebagai pihak yang berperan untuk menyalurkan informasi, sekaligus mengekspresikan ekspektasi dari publik, maka media harus dapat menyajikan berita yang faktual atas sebuah fenomena sosial yang tengah terjadi di sebuah negara. Salah satu upaya media dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menjadi *watch dog*, atau pengawas gerak-gerik pemerintah, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat sipil (Satwika, 2019).

Selanjutnya, melalui publikasi berita yang dirilisnya, media turut memiliki kekuatan sosial yang dapat mengerahkan kontrol sosial. Hal ini bisa didapati dengan liputan isu-isu dunia internasional, atau gejolak politik suatu negara dengan

merefleksikan pandangan publik dalam bias tertentu. Tak jarang, negara turut menggunakan media sebagai batu loncatan dalam menampilkan 'citra'nya kepada dunia, terutama yang berkaitan dengan agenda politik dan pembentukan kebijakan luar negeri. Dinamika ini kemudian membuat media tak luput dari beberapa unsur seperti ketegangan, konflik kepentingan, hingga aspek dramatik (Adrianti, 2015).

Interelasi antara media dengan politik internasional ini sendiri dijelaskan oleh Doris Graber dalam tulisannya "*Mass Media and American Politics*", bahwa setidaknya ada empat fungsi media massa bagi negara atau kekuasaan internasional. Fungsi media yang pertama, adalah sebagai penyedia informasi terbaru tentang berbagai peristiwa politik yang tengah merebak di masyarakat. Pemberitaan media mengenai hal ini kemudian dapat dijadikan negara sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Lalu selanjutnya, media bisa mengakomodir ruang kesadaran sosial bagi negara untuk meninjau opini publik yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara fungsi ketiga dan keempat, media dapat berperan sebagai fasilitator negara untuk menyampaikan pesannya dalam lingkup pemerintahan maupun diluar pemerintahan, sekaligus memelihara kontinuitas kekuasaan di tengah menjalankan peran tersebut (Graber, 1984). Pentingnya membangun hubungan timbal balik dalam sebuah sistem internasional ini juga dilihat oleh media sebagai sebuah kebutuhan untuk menciptakan revolusi komunikasi. Dalam hal ini, Harsono Suwardi dan Ibnu Ahmad dalam tulisannya "*Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*" turut menjelaskan aspek-aspek media yang penting dalam proses pembangunan komunikasi yang timbal balik antara

masyarakat dengan kuasa politik. Yang pertama, adalah daya jangkau (*coverage*) media dalam menyebarkan berita. Suatu isu politik dapat menjadi perhatian masyarakat dan kuasa politik apabila daya jangkau media dalam menyebarkan berita melewati batas wilayah (geografis), jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, kelompok usia, dan aspek psikografis. Lalu kedua, adalah kemampuan media dalam melipatgandakan pesan, dimana hal ini berkaitan dengan jumlah eksemplar media cetak dan repetisi penyiaran isu yang diberitakan. Pengulangan isu-isu yang diberitakan oleh media dapat menarik perhatian masyarakat untuk menganggap bahwa berita tersebut merupakan sebuah isu penting, atau patut untuk dijadikan sebagai suatu urgensi. Selanjutnya, media massa juga dapat menyetir pemberitaan suatu isu sesuai ideologi yang dipegang olehnya. Kemampuan media dalam mewacanakan suatu peristiwa politik ini sendiri erat kaitannya dengan *agenda setting*. Yang terakhir, pemberitaan isu politik oleh media umumnya berkaitan dengan media lain, sehingga tercipta sebuah rantai informasi (*media as links in other chains*) yang turut menambah kekuatan penyebaran informasi politik, dimana hal ini berkelindan pula dengan respon publik dalam membangun ruang diskusi (*public sphere*) yang menghasilkan buah berupa opini publik (Suwardi & Hamad, 2004).

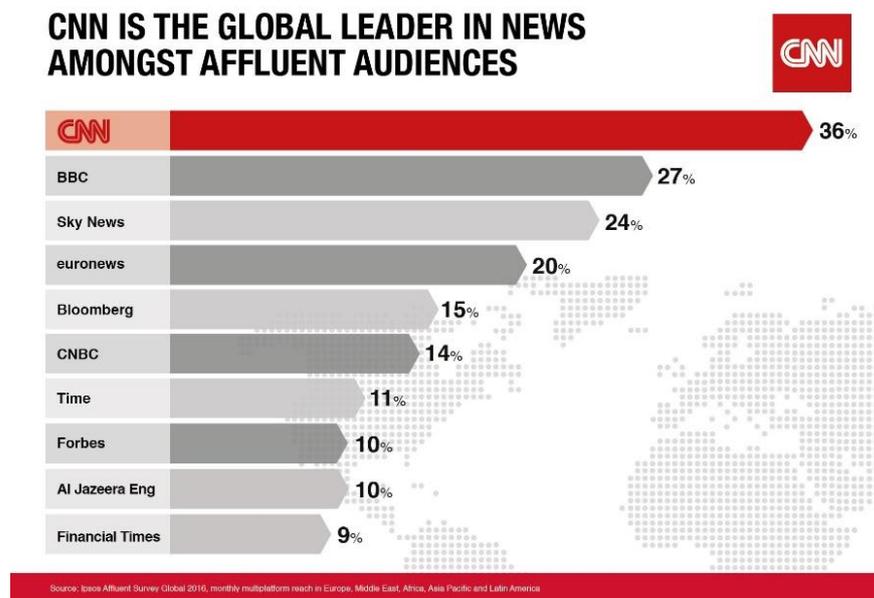
Sebagai pembentuk opini publik, proses transformasi gagasan kepada publik tentunya menjadi bagian yang vital, karena hal ini berhubungan dengan reaksi dan aksi yang akan ditampakkan oleh publik dan dikerahkan oleh pemangku kebijakan. Dalam kondisi krisis, penyebaran gagasan oleh media yang berkembang menjadi opini publik dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri

suatu negara. Utamanya negara yang masih memegang prinsip demokrasi, karena media masih diklasifikasikan sebagai *the fourth estate* setelah badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Ferarto, 2017).

Salah satu kanal media internasional yang paling santer namanya adalah *Cable News Network* (CNN). Kanal media ini sendiri pertama kali dibentuk, sekaligus dikenalkan kepada publik pada tahun 1980 oleh Ted Turner. Sejak awal kemunculannya, CNN menyediakan medium berita sebagai “wajah” publikasi Amerika Serikat, namun orientasinya kemudian berkembang untuk menjangkau audiens internasional, memperluas kemampuan *newsgathering*, sekaligus menempati posisi paling atas sebagai jaringan televisi global (Prasetyo, 2018). Bersamaan dengan visi tersebut, Turner kemudian meluncurkan sejumlah variasi program dari CNN. Pada tahun 1981, ia meluncurkan CNN Headline News, hingga berlanjut pada tahun 1985 dengan *Cable News Network International* (CNNI). Konsistensi dan improvisasi CNN membuahkan hasil dengan menjadi *god father* bagi kanal media global di seluruh dunia. Hingga kini, kurang lebih ada dua ratus negara dengan bermacam-macam media yang melihat CNN dalam pembawaan beritanya (McPhail, 2006).

Adapun berdasarkan survey global yang dilakukan oleh IPSOS (*Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur*) CNN menduduki peringkat pertama dalam kategori brand media internasional. CNN memiliki jangkauan 36% audiens dalam tayangan televisi per-bulan, sementara media seperti BBC mencapai 27%, dan CNBC sebesar 14% setiap bulannya (CNN, 2014). Grafik statistik dari peringkat brand CNN ini sendiri terlampir lebih lanjut pada Gambar 1.1 :

**Gambar 1.1**  
**Grafik audiens CNN secara global**



Sumber: *New Global Survey Ranks CNN As Top International*

*News Brand, CNN, 2014.*

Dengan masifnya pemberitaan yang dirilis oleh CNN, media ini tentu membawa efek dalam mempengaruhi masyarakat global, sekaligus praktik dari politik global itu sendiri. Salah satu tindakan CNN yang paling terkenal adalah penayangan berita selama dua puluh empat jam penuh ketika Perang Teluk dimulai. Keberanian CNN dalam meliput serangan bom sekutu dan rudal jelajah di Irak menuai simpati serta dukungan dari publik, khususnya audiens dan para pemangku kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan tindakan intervensionis di Timur Tengah (Rezza, 2019). Adapun relasi yang dimiliki CNN dengan negara-negara di dunia menjadikannya media dengan jangkauan transnasional. Dalam arus

globalisasi kini, siapapun yang memiliki akses informasi dan menguasai media, maka dapat memegang kontrol atas sistem internasional, sehingga pihak yang mengendalikan peredaran media (cetak dan elektronik) patut diklasifikasikan sebagai negara yang memiliki *power* di dunia. Dalam hal ini, fenomena tersebut dibuktikan dengan menyeruaknya dominasi AS dan Eropa dengan media yang mereka miliki, yakni dengan CNN maupun BBC.

Meskipun demikian, kedua kanal media raksasa tersebut memiliki kecenderungan serta karakteristik yang berbeda dalam memberitakan suatu isu yang sama. Dalam studi yang dilakukan oleh Jurgen Gerhards dan Mike S Schafer, mereka mencoba menelaah perbedaan gaya pemberitaan tersebut dengan mengambil beberapa studi kasus serangan terorisme, diantaranya adalah serangan di London, Madrid, Amman, dan Sharm El Sheikh dengan menggunakan beberapa dimensi sebagai variabel perbandingan, yang pertama adalah signifikansi dari peristiwa terorisme yang diperlihatkan oleh media dalam pemberitaannya, lalu yang kedua adalah penggambaran pelaku sekaligus korban yang terdampak oleh tragedi yang terjadi, dan yang terakhir adalah pembingkaiannya dari berita itu sendiri dengan indikasi bahasa politik yang digunakan.

Adapun dalam perbandingannya, CNN dan BBC sama-sama sepakat bahwa aksi terorisme adalah isu yang patut dijadikan urgensi keamanan dan merupakan tindakan imoril. Hanya saja, dalam memberitakan tragedi-tragedi ini, CNN seringkali menggunakan bahasa politik yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya konflik peperangan seperti penyebutan '*military equipments*' dan '*moving tanks*'. Adapun dalam pemberitaannya, CNN mengontekstualisasi tragedi ini sebagai

peristiwa global, dimana negara sedang dihadapkan dengan ancaman geopolitik dengan serangan dari organisasi terorisme Islam transnasional. Hal ini bisa didapati dalam fokusnya dalam mengutip kebijakan luar negeri suatu negara dibanding mitigasi domestiknya, yang biasanya disertakan oleh CNN dalam penggalan tanggapan dari aktor negara seperti Presiden atau Perdana Menteri yang bersangkutan (Jurgen Gerhards, 2014). Sementara itu, BBC memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembawaan beritanya. Dalam publikasinya, ia menyorot latar belakang pelaku secara personal, dengan latar belakang korban yang jatuh pula, dimana terdapat indikasi multi-etnis dan multi-agama yang lebih tersurat dibanding menggambarkan serangan yang terjadi sebagai ‘isu global’ atau ‘konflik geopolitik’ antara sebuah negara dengan organisasi terorisme Islam transnasional. BBC juga menyorot tragedi terorisme tanpa mengindahkan motif politik dibalik tindakan pelaku. Hal ini sekaligus meringkas minimnya sorotan BBC atas kebijakan politik luar negeri dari negara-negara yang terlibat (Jurgen Gerhards, 2014). Dari kedua karakteristik media ini, penulis mendapati bahwa pemberitaan CNN lebih tajam dan mengindikasikan adanya konsiderasi untuk melihat proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara atas sebuah isu politik. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini penulis mengambil CNN sebagai subjek utama untuk menganalisis relasi pemberitaan media, masyarakat, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri Prancis pasca tragedi Paris Attack di tahun 2015.

Mengacu pada topik tersebut, maka peneliti akan terlebih dulu latar belakang politik Prancis serta dinamika yang mengelilinginya pada periode kepemimpinan Francois Hollande. Di tahun 2015, Eropa mengalami krisis

pengungsi lantaran konflik revolusi demokratik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Terhitung sebanyak 800.000 orang imigran telah mencapai Italia dan Yunani. Sebanyak 84% persen dari imigran tersebut berasal dari Irak, Eritrea, Somalia, serta Suriah (Human Rights Watch , 2015). Dengan arus imigran yang tinggi ini, Prancis bahkan terhitung menjadi negara dengan populasi Muslim paling banyak di Eropa, dengan total 57 juta jiwa, atau sekitar 8,8% dari total penduduk Prancis (Pew Research Center, 2017). Melalui konferensi yang diadakan bersama Uni Eropa, Prancis kemudian sepakat dengan keputusan pendistribusian pengungsi di negara-negara Eropa (*Common European Asylum System*), dan turut berpartisipasi dalam menampung imigran.

Pada siaran langsung 7 September 2015, Presiden Prancis, Francois Hollande mendeklarasikan komitmennya untuk menerima sebanyak 24.031 pengungsi sebagai bagian dari rencana Uni Eropa untuk mengendalikan fenomena krisis imigran dengan berpegang pada unsur *humanitarian duty* (Prasetyo, 2018). Berbagai respon merebak dari khalayak umum. Sebanyak 70% masyarakat Prancis menyatakan ketidaksetujuannya, sementara 26% sisanya menyetujui keputusan penerimaan imigran (Pew Research Center, 2016). Publik beranggapan bahwa keputusan tersebut sangat riskan untuk sekuritas negara. Mereka juga menyampaikan kekhawatirannya atas lonjakan aktivitas terorisme di Prancis. Selain alasan keamanan, publik turut beranggapan bahwa para imigran yang hadir akan merenggut kesempatan di lapangan kerja dan mendapat keuntungan sosial. Intensitas kekhawatiran ini kian melejit dengan hadirnya resiko tanggungan beban ekonomi maupun sosial dari penerimaan imigran oleh pemerintah Prancis.

Keputusan penerimaan imigran oleh Francois Hollande ternyata berujung pada petaka bagi Prancis. Pada tanggal 13 November 2015, sebuah ledakan terdengar dari luar bangunan *Stade de France*, bertepatan dengan diselenggarakannya pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Jerman. Suara ledakan tersebut disinyalir berasal dari aksi bom bunuh diri, dengan total empat orang korban; tiga diantaranya adalah pelaku bom bunuh diri sementara satu yang lain merupakan seorang pejalan kaki (CNN Editorial Research, 2022). Francois Hollande kontan mengumumkan keadaan darurat dan menutup perbatasan-perbatasan Prancis saat itu juga. Serangan Paris ini berlangsung sepanjang malam di enam titik lokasi dengan enam serangan bertubi-tubi. Total korban meninggal mencapai sekitar 130 jiwa, sementara sekitar 494 korban lain mengalami luka-luka (CNN Editorial Research, 2022). Fenomena mengerikan ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, namun efek yang ditinggalkan bagi masyarakat Prancis sangat dalam dan berlangsung secara berkepanjangan. Peristiwa Paris Attack 2015 ini tentu menyita perhatian dunia, sehingga bukan hanya media harian domestik saja yang membuat liputan mengenai tragedi terkait, namun juga media internasional seperti CNN (Ferarto, 2017).

Secara kolektif, publik mengait-ngaitkan peristiwa kekacauan serangan terorisme ini dengan imigran. Tak sedikit dari mereka yang beropini bahwa gerakan radikalisme yang terjadi dilakukan oleh suatu etnis/agama tertentu. Salah satu efek jangka panjang dari peristiwa ini ialah kewaspadaan masyarakat Prancis terhadap terorisme, perang, serta radikalisme Muslim. Karena dalam kasus ini, serangan bom memiliki keterkaitan erat dengan organisasi ekstrimis ISIS. Serangan bom yang

kedua kalinya menimpa Prancis tentu saja memberikan tekanan bagi pihak pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat dan efisien, baik dalam ranah domestik, maupun dalam kebijakan luar negerinya. Pasca Insiden Charlie Hebdo yang terjadi pada bulan Januari, serangan November kemudian mendorong pemerintah Prancis untuk menerapkan “*State of Emergency*” dimana merujuk pada Hukum Uni Eropa tahun 1955, aparat keamanan negara (polisi dan tentara) berhak untuk mencurigai dan menyidik siapa saja yang dianggap mencurigakan berkaitan dengan aksi terorisme (Ferarto, 2017). Upaya peningkatan keamanan internal ini turut disertai dengan penutupan tempat-tempat sensitif yang memungkinkan adanya serangan lanjutan seperti bandara, stasiun, dan spot pariwisata. Perdana Menteri Manuel Valls mengumumkan keputusan kontrol ini kepada publik sebagai bentuk “mengatasi perang yang diikrarkan oleh teroris” dan mendapat respon berupa persetujuan secara kolektif dari masyarakat.

Dalam proses perumusan kebijakannya, tentu saja latar belakang politik negara, serta identitas sosial dan budaya masyarakat Prancis menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Bila menilik sejarah Prancis sendiri, negara ini sebetulnya sudah lama menjadi salah satu tujuan utama bagi imigran untuk mencari suaka, bahkan sejak zaman Perang Dunia (1914-1918) hingga Revolusi Industri kemudian meningkatkan lonjakan imigran di Prancis. Kondisi ini tentu menimbulkan beberapa konsekuensi, dimana salah satunya adalah gesekan antara kaum imigran dengan penduduk asli Prancis. Persaingan dalam lapangan pekerjaan, serta kesenjangan sosial yang timbul ini mendukung sentimen pada masyarakat sipil Prancis, bahwa kedatangan imigran dalam jumlah banyak inilah yang menjadi

penyebab “*social struggle*” yang dialami oleh bangsa Prancis (Gumilar, 2020). Sentimen ini kemudian berkembang semakin jauh, dengan merebaknya diskursus dalam ruang-ruang publik, sehingga tercipta premis Islamofobia terhadap imigran-imigran di Prancis. Maraknya fenomena Islamofobia ini lantas merambat dari aspek kehidupan sosial masyarakat, hingga lingkup politik negara.

Dalam beberapa kebijakannya, Prancis bahkan tampak berusaha melembagakan aturan-aturan yang menyudutkan kaum Muslim, atau lebih tepatnya imigran Muslim dalam kasus ini. Kehadiran kaum Muslim di Prancis dianggap tidak bisa menciptakan sinergi dengan identitas negara Prancis, sehingga muncul kebijakan diskriminatif yang memaksa imigran untuk meninggalkan identitas aslinya bila individu yang bersangkutan hendak menetap di Prancis. Hal ini tak ayal membuat Islamofobia semakin mengakar kuat di Prancis, dan persepsi negatif terhadap imigran Muslim akan mempengaruhi bagaimana opini-opini publik di tengah masyarakat Prancis ini tercipta, sekaligus bagaimana Islamofobia mempengaruhi gejolak dinamika sosial di kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, pasca tragedi Paris Attack sendiri pemerintah Prancis sempat mereformasi perjanjian yang menyangkut penggunaan visa Schengen. Perjanjian Schengen sendiri merupakan kesepakatan yang dipraktekkan oleh sejumlah negara Eropa dengan menghapuskan pengawasan perbatasan di lingkup area mereka, dimana terdapat izin masuk jangka pendek (dengan visa Schengen) dan kerjasama polisi lintas batas dengan tujuan kemudahan akses warga negara di daerah yang terikat dengan perjanjian tersebut dengan menggunakan satu visa saja (Anjasmara, 2017). Oleh karena itu, Presiden Hollande memutuskan untuk menerapkan kontrol

perbatasan untuk negaranya dengan hanya mengaplikasikan perjanjian Schengen titik-titik perbatasan paling rentan. Dilansir dari media France 24, salah satu jalur masuk kelompok teroris pelaku pengeboman di Paris adalah melalui Brussels, dimana Prancis berbatasan langsung dengan Belgia (France24, 2015). Sehingga, dalam upaya kontrol perbatasan ini, wisatawan dari negara-negara yang berbatasan dengan Prancis akan diminta menunjukkan kartu identitas seperti paspor dan visa Prancis.

Sejarah panjang Prancis dalam hal penerimaan migran, serta partisipasinya yang aktif dalam menanggulangi krisis imigran Eropa merupakan bukti atas komitmen negara ini dalam menindak isu domestik maupun regional. Adanya konstitusi yang ditetapkan di Prancis mengenai pencarian suaka, hingga upaya pengembalian stabilitas keamanan negara setelah terjadi penyerangan terorisme merupakan sesuatu yang penulis hendak teliti lebih jauh. Selain itu, pemberitaan masif dari CNN terkait kasus Paris Attack juga memicu lahirnya opini-opini publik atas isu yang sedang hangat, dimana opini publik ini akan dipengaruhi pula dengan faktor identitas kolektif masyarakat Prancis. Selain itu, sistem pemerintahan Prancis dan tradisi demokrasi yang dipegangnya membuat celah bagi media sekaligus opini masyarakat untuk memberikan pengaruh dalam proses perumusan kebijakan keamanan negara melalui kontrol perbatasan Prancis. Oleh karena itulah, penulis mengangkat topik ini dengan Prancis sebagai fokus utama penelitian, lantaran penulis mendapati adanya keterhubungan antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam proses pembentukan kebijakan negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah pada sub-pembahasan sebelumnya, maka dapat pertanyaan utama dari penelitian ini adalah: *“Bagaimana implikasi pemberitaan media Cable News Network (CNN) terhadap kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan di Prancis pasca tragedi Paris Attack di tahun 2015?”*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai melalui penulisan karya ini adalah memahami peran media *Cable News Network (CNN)* dan opini publik Prancis sebagai aspek yang memberikan implikasi terhadap suatu kebijakan negara.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Sementara secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana implikasi dari media *Cable News Network (CNN)* dan opini publik di Prancis terhadap kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan negara setelah tragedi Paris Attack di Tahun 2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Dari penelitian ini, diharapkan akan timbul sejumlah manfaat bagi kepentingan akademik terhadap khalayak umum. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi dunia pendidikan,

khususnya studi Hubungan Internasional. Melalui topik penelitian yang diangkat, penulis berharap dapat memperkaya referensi literatur terkait implikasi pemberitaan media internasional, secara khususnya Cable News Network (CNN) dan opini publik dalam mendorong kebijakan luar negeri sebuah negara. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengangkat isu kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan Prancis setelah tragedi Paris Attack di tahun 2015.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sementara di ranah praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan kontribusinya dalam bentuk perluasan wawasan pembaca terkait fenomena terorisme dan bagaimana negara menanggulangi kerusakan yang ditimbulkan dari sisi keamanan/sekuritas. Penulis juga berharap akan tercipta kesadaran pembaca terhadap peran media yang krusial dalam membangun opini publik suatu bangsa sehingga dapat mempengaruhi langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, literatur ini dapat menjadi dorongan bagi pembaca untuk mencermati liputan yang diberitakan oleh kanal-kanal media sekaligus dapat mengkritisi bagaimana cara fenomena tersebut dibingkai oleh pihak yang bersangkutan.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1. Literature Review**

Adapun beberapa sampel literatur yang diambil penulis sebagai tinjauan pustaka untuk penulisan karya ini yaitu:

Artikel pertama, dimuat dalam *Journal of Rio De Janerio* dengan tajuk “*Public Opinion and Framing Effects of Argentine Foreign Policy Towards Brazil: Evidence from a Survey Experiment in Urban Centers in Argentina*” oleh Tomas Olego dan Carola Lustig. Secara garis besar, artikel ini mengulas korelasi opini publik dengan kebijakan luar negeri, dimana seringkali ditemui pergerakan “pasif” dari publik itu sendiri. Literatur ini turut mengkaji efek dari informasi yang disebarkan terhadap publik. Hasil survey yang dilakukan oleh penulis menunjukkan, bahwa bias ideologi sangatlah signifikan, yang mana hal tersebut dapat diperkuat oleh informasi yang disebarkan oleh media kepada publik (Tomas Olego, 2016).

Artikel kedua, dalam Jurnal *Political Communication* dengan judul “*The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations*” ditulis oleh Eytan Gilboa. Literatur ini menginvestigasi bagaimana media dan saluran televisi global seperti CNN sebagai “*decisive actor*” dalam menentukan kebijakan politik dan agenda tertentu oleh pemerintah. Selain itu, tulisan ini juga menampilkan beberapa agenda penelitian lebih jauh mengenai perdebatan dalam teori “*CNN Effect*” seperti; kesan memaksa sejumlah kebijakan pada pemimpin negara dan memberikan limitasi untuk mereka, mengganggu proses konsiderasi kebijakan, hingga efek yang lebih positif seperti membantu mempermudah negara untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Penulis juga mengatakan bahwa eksplorasi teori “*CNN Effect*” ini merupakan studi terminologi yang menarik, mengingat media sendiri terkadang dianggap sebagai lawan dari

kepentingan pemerintah dalam cakupan isu intervensi kemanusiaan dan negoisasi Internasional (Gilboa, 2016).

Tinjauan pustaka ketiga bersumber dari literatur “*In Search of Soft Power: Does Foreign Public Opinion Matter for US Foreign Policy?*” oleh Benjamin E Goldsmith dan Yusaku Horiuchi dalam *Journal of World Politics* yang mengulas urgensi *soft power* dalam Hubungan Internasional. Teori dalam tulisan ini mengacu pada teori Joseph Nye, yang kemudian disempurnakan oleh Goldsmith dan Horiuchi dengan memusatkan perhatian terhadap opini publik asing mengenai kebijakan luar negeri Amerika. Secara garis besar, literatur ini menyebutkan bahwa opini publik memiliki signifikansi dalam komitmen pasukan perang di Irak, hasil ini juga menjadi penyempurnaan argumen dari Nye tentang *soft power* (Benjamin E Goldsmith, 2012).

### **1.5.2. State of The Art**

Penulis telah menemui sejumlah literatur-literatur terdahulu yang mengangkat topik media sebagai isu utama dalam suatu fenomena politik. Namun, mayoritas dari karya ilmiah yang ada hanya berfokus pada media domestik (*Le Monde, Le Figaro, Liberation*) sebagai subjek dan bagaimana proses pembentukan opini publik di kalangan masyarakat saja. Masih terdapat kesenjangan dengan minimnya penelitian mengenai relasi media internasional, masyarakat, dan pemerintah hingga perumusan dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Oleh karenanya, peneliti berusaha menyempurnakan alur berpikir tersebut dengan melakukan analisis peran dan implikasi pemberitaan media *Cable News Network*

(CNN) dalam kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan Prancis pasca tragedi Paris Attack 2015.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1. Teori Framing**

Ide mengenai “pembingkai” media pertama kali digagas oleh Beterson pada 1955, dimana hal tersebut dimaknai sebagai struktur konseptual yang dapat mengorganisir pandangan politik, wacana, atau kebijakan sebagai respon untuk mengapresiasi sebuah realitas. Sehingga secara sederhana, framing sendiri dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan konstruksi realitas oleh media dengan menggunakan dua aspek; memilih fakta, dan menuliskan fakta dengan kalimat serta preposisi kata yang dihendaki oleh media yang bersangkutan untuk menonjolkan bagian tertentu dari realitas tersebut supaya isu yang diangkat lebih mudah dikenal/diingat oleh audiens (Eriyanto, 2002). Adapun teori ini kemudian banyak dikembangkan oleh para akademisi. Salah satunya adalah model framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang memiliki dua unsur utama; konsepsi psikologis dan konsepsi sosiologis. Kedua konsep ini diintegrasikan oleh Pan dan Kosicki melalui keterhubungan jurnalis, sumber, dan khalayak yang mengonsumsi berita itu sendiri. Pada dasarnya, dalam membangun konstruksi realitas pada audiensnya, seorang wartawan perlu mempertimbangkan seleksi nilai-nilai sosial yang dipegangnya dengan khalayak, sehingga dalam proses framing akan ada proses identifikasi, klasifikasi, dan penafsiran isu dari berita yang diangkat oleh

media. Adapun Pan dan Kosicki mengungkapkan empat unsur sebagai variabel pendekatan framing yang bisa dirujuk pada Tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Unsur dalam variabel pendekatan framing media**

<b>Struktur</b>	<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit yang diamati</b>
Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)	Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan
Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)	Kelengkapan berita	5W+1H
Tematik (Cara wartawan menuliskan fakta)	Detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, konjungsi antar kalimat
Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon, grafis, metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Eriyanto, 2002.

Unsur sintaksis dapat dipahami sebagai bagian dimana wartawan menyusun peristiwa yang diberitakan. Pemahaman wartawan dapat dilihat dari bagaimana ia menyusun fakta yang ada dalam bagian umum berita, seperti yang ditampilkan pada bagian headline, lead, latar, dan kutipan yang disertakan dalam narasi yang diunggah. Bagian-bagian ini dapat ditelaah untuk melihat framing yang digunakan

oleh media, misalnya pada bagian headline, penggunaan tanda tanya dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam topik yang diangkat, atau penggunaan tanda kutip yang menandakan adanya perbedaan perspektif media terhadap topik yang diberitakan. Umumnya, pada bagian lead-lah audiens dapat melihat perspektif dari media. Lalu pada bagian latar, barulah media menentukan ke arah mana pandangan khalayak akan dibawa, hal ini akan ditentukan dari pembangunan latar belakang isu oleh redaksi, apakah narasinya mendukung atau menolak. Baru setelahnya, media menyertakan kutipan-kutipan untuk membangun objektivitas. Pengutipan sumber dalam berita bisa menjadi perangkat kuat framing dalam tiga hal: mengklaim validitas dari pernyataan yang dibuat, menghubungkan poin tertentu dari pandangan media dengan pejabat yang berwenang, dan mengecilkan pandangan tertentu dengan pernyataan mayoritas (Eriyanto, 2002).

Selanjutnya pada struktur skrip, upaya framing media akan terlihat dari bagaimana wartawan menuliskan beritanya, kelengkapan unsur 5W+1H dapat menjadi indikator utama penulisan, sekaligus memperlihatkan bagaimana fakta disajikan. Melalui penyusunan keenam unsur tersebut, audiens dapat menangkap bagian yang didahulukan/disertakan dalam narasi, sekaligus bagian mana yang dihapus/disembunyikan oleh media. Dari suatu skrip berita pula, audiens dapat melihat isu yang berusaha ditekankan oleh media kepada khalayak.

Menurut Pan dan Kosicki, berita tak ubahnya pengujian atas sebuah hipotesis. Oleh karena itu, bagian tematik dalam sebuah berita merupakan bagian yang juga penting, karena bagaimana media menuliskan fakta dalam beritanya, termasuk pemilihan jalinan kata, serta proposisi dalam sebuah kalimat. Fakta yang

tidak berhubungan pun dapat menjadi berhubungan apabila media menghendaknya dengan menyusun kalimat-kalimat dalam narasi dengan koherensi tertentu. Misalnya koherensi sebab-akibat, koherensi penjelas, atau koherensi pembeda.

Sementara itu pada unsur retorik, framing media dapat dilihat dari pemilihan kata untuk narasi berita, termasuk idiom-idiom tertentu untuk mendukung pernyataan bahwa apa yang ditulis dalam pemberitaan tersebut adalah suatu kebenaran. Selain pemilihan kata, penekanan pesan dalam berita bisa didukung dengan menggunakan unsur grafis seperti foto, gambar, maupun tabel sebagai pendukung gagasan media yang bersangkutan. Kehadiran elemen grafik ini sendiri menimbulkan efek kognitif yang mengontrol perhatian dan ketertarikan audiens dalam menyimak isu yang dibawa (Eriyanto, 2002).

### **1.6.2. Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri**

Adanya diskursus mengenai masalah politik internasional tentu tidak terlepas dari pengambilan keputusan oleh aktor-aktor dibaliknya. Baik aktor negara maupun non-negara, keduanya sama-sama memiliki porsi dalam memberikan pengaruhnya terhadap putusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Lingkup kebijakan luar negeri itu sendiri termasuk besar, meliputi seluruh tindakan negara terhadap lingkungan eksternalnya, maupun aktivitas yang terjadi secara internal. Dari kebijakan tersebut, biasanya ada empat tujuan yang hendak dicapai; *security*/keamanan, otonomi, kesejahteraan, dan *status/prestige* (Dhea T. Lumentut, 2020). Pada aspek input, Kegley pertama-tama menyebutkan indikator pada level global dan eksternal dimana hal ini digambarkan sebagai fenomena global yang

menjadi tren, atau topik hangat dan sedang dibicarakan oleh negara-negara lain di dunia sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah urgensi. Ia menyebutkan contoh dari indikator ini dengan merujuk pada peristiwa penyerangan terorisme 9/11 di Amerika Serikat yang dengan segera menggerakkan negara lain untuk bersimpati, atau membentuk aliansi untuk menghadapi terorisme bersama AS. Indikator kondisi global terkadang juga melibatkan peran dari lembaga-lembaga suprasional untuk menekan negara dalam membentuk kebijakan luar negeri.

Pada level kedua yakni *state level*, yang menjadi sorotan dibalik sebuah kebijakan luar negeri adalah kondisi internal beserta tingkatan sistem politik, ekonomi, atau militer yang dimiliki sebuah negara. Dinamika politik dan sosial dalam negeri menjadi aspek yang penting, karena setiap sebuah negara pasti mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan domestiknya. Dalam tulisannya, Kegley membagi contoh bentuk pemerintahan sebuah negara menjadi dua; autokratik dan demokratik. Bagi negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratik, terdapat celah bagi opini publik, media massa, maupun kelompok kepentingan untuk turut serta memberikan kontribusinya menyangkut putusan kebijakan luar negeri. Selanjutnya, pada level individu, terdapat keterkaitan antara pola pikir, serta ideologi dari para *decision maker* dengan kebijakan luar negeri yang diambilnya (Charles W. Kegley, 2010). Sehingga, dari adanya proses input tadi, lahirlah output berupa kebijakan luar negeri.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1. Definisi Konseptual**

### 1.7.1.1 Media Internasional

Ditengah pesatnya arus globalisasi, pertukaran informasi tentu menduduki peran yang vital. Proses pertukaran informasi itu sendiri membutuhkan suatu medium yang mencakup ranah global, dimana hal ini bisa diakomodasi oleh keberadaan media internasional. Mengutip dari Shirley Biagi dalam bukunya *“Media/Impact: An Introduction To Mass Media”*, terdapat beberapa kerangka berpikir yang bisa digunakan untuk mendefinisikan media global, dimana salah satunya adalah cara pandang libertarian. Melalui cara pandang libertarian, media internasional didefinisikan sebagai suatu medium yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dimana tujuan dari publikasinya adalah merangkul diversitas argumen atas sebuah fenomena sosial tanpa adanya monopoli dan tekanan dari otoritas tertentu (Biagi, 2015). Bahkan, seiring dengan perkembangannya, cara pandang libertarian juga melabeli media sebagai *“self-regulating marketplace of ideas”* yang sesuai dengan bagaimana media internasional diperjual-belikan sebagai komoditas umum (Stanley J. Baran, 2014).

### 1.7.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Secara tradisional, ide dari kebijakan luar negeri terletak pada bagaimana suatu negara berinteraksi dengan aktor-aktor internasional yang lain. Beberapa ahli memahami kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem kelembagaan yang kompleks, dimana didalamnya terdapat usaha untuk mempengaruhi perilaku negara lain melalui penyesuaian negara sendiri terhadap kondisi global saat itu. Menurut Charles Hermann, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai *“those discrete official actions of the authoritative decision makers of nation’s government, of their*

*agents, which are intended by the decision makers to influence the behavior of international actors external to their own polity*”, artinya, kebijakan luar negeri terdiri dari sejumlah tindakan resmi dari pembuat keputusan untuk mempengaruhi tindakan para aktor internasional diluar batas kedaulatan negara (Mansbach & Taylor, 2017). Sehingga secara singkat, menurut Mansbach dan Taylor, kebijakan luar negeri bisa dipahami sebagai upaya meraih kepentingan negara, yang harus ditinjau sisi eksternalnya, maupun dari sisi internal seperti sistem birokrasi negara dan keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam mencapai *outcome* tertentu.

### **1.7.1.3 Kontrol Perbatasan**

Batas-batas negara merupakan salah satu manifestasi yang krusial dalam kedaulatan negara, dan merupakan hak suatu negara terhadap wilayahnya. Adapun beberapa definisi dan karakteristik perbatasan ini sendiri dijelaskan oleh O.J Martinez dalam bukunya “*Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands*” yang memisahkan perbatasan dalam 4 tipologi. Yang pertama, yakni perbatasan *alienated vorderlan*, dimana wilayah perbatasan yang tidak terdapat kegiatan lintas batas lantaran terjadi konflik, serangan, maupun hal-hal yang menyangkut keamanan suatu negara. Kedua, adalah *coexistent borderland*, dimana wilayah perbatasan yang terjadi konflik masih dapat ditekan sampai tingkat yang dapat dikendalikan, lalu *interdependent borderland* dimana wilayah perbatasan antar negara dinilai relatif stabil dengan adanya kerjasama ekonomi, dan yang terakhir adalah *integrated borderland*, dimana sebuah wilayah perbatasan memiliki kegiatan perekonomian yang menjadi satu (Martinez, 1994). Oleh karena kondisi politik negara yang berbeda-beda, maka pemerintah yang bersangkutan

harus dapat membuat kebijakan atas isu yang dihadapi secara sesuai. Bila masalah pada perbatasan negara terletak pada isu keamanan, maka perlu dibuat kebijakan peningkatan sekuritas negara pada titik-titik yang dirasa krusial (Asri & Hidayat, 2017).

## **1.7.2. Definisi Operasional**

### **1.7.2.1 Media Internasional**

Media internasional sebagai aktor non-negara turut memiliki peran sebagai *decisive actor* dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, media internasional yang diangkat sebagai isu utama adalah Cable News Network (CNN). Segala analisis tentang implikasi pemberitaan CNN terhadap opini publik dan kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan Prancis pasca Paris Attack 2015 didasarkan pada liputan yang dimuat pada media terkait.

### **1.7.2.2 Kebijakan Luar Negeri**

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengelaborasi kebijakan yang diambil oleh Prancis dibawah kepemimpinan Francois Hollande, terutama yang berkaitan dengan kebijakan keamanan pasca tragedi Paris Attack 2015.

### **1.7.2.3 Kontrol Perbatasan**

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mengelaborasi secara komprehensif, kebijakan-kebijakan terkait kontrol perbatasan negara yang dikerahkan oleh pemerintah Prancis pasca Serangan Prancis di tahun 2015.

## **1.8 Argumen Penelitian**

Berdasarkan paparan sub-pembahasan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk membangun argumen bahwasannya media *Cable News Network* (CNN) memiliki peran dalam mengonstruksikan fenomena Paris Attack dengan sedemikian rupa sebagai upaya untuk membangun opini publik Prancis. Dengan ideologi yang dipegang oleh CNN, serta kemampuan media yang bersangkutan dalam membingkai berita terkait Serangan Paris, maka CNN memiliki celah untuk mengarahkan cara pandang publik agar selaras dengan agenda yang dibawanya terkait isu radikalisme, dan terorisme oleh kelompok ekstrimis Islam. Selanjutnya, opini publik dari masyarakat Prancis, serta gejolak dinamika sosial yang ada akan mempengaruhi bagaimana pemerintah merespon eksistensi opini publik pada ranah kehidupan sosial, dan merumuskan kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan yang selaras dengan ideologi kolektif masyarakat Prancis.

## **1.9. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Menurut John W Cresswell, metode ini merupakan pendekatan yang paling cocok untuk mengkaji fenomena sosial, dan sifatnya dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif (Cresswell, 1994). Melalui metode kualitatif ini pula, penulis berusaha memahami fenomena yang diangkat dan identifikasi pesan-pesan yang ditulis dalam publikasi media. Selain itu, bentuk referensi penelitian juga berupa teks, kata-kata tertulis yang memiliki kaitan sekaligus dapat menunjang penelitian penulis. Sumber data untuk menyokong argumen penelitian ini didapatkan dari sumber primer seperti

literatur yang kredibel dan aksesibel di laman internet seperti jurnal, berita, artikel, maupun sumber dari buku cetak. Tentunya sumber-sumber referensi ini diambil dengan mengaitkan informasi yang didapatkan dengan subjek utama penelitian.

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berupaya memberikan penjabaran atas hipotesis dari aspek-aspek yang diteliti, yakni peran dan implikasi dari media Cable News Network (CNN) dan opini publik di Prancis terhadap kebijakan keamanan melalui kontrol perbatasan pasca tragedi Paris Attack di tahun 2015.

### **1.9.2. Jenis Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan variasi data kualitatif yang berupa teks, kata-kata tertulis, sumber verbal maupun non-verbal yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis. Selanjutnya, penulis juga menggunakan data kuantitatif berupa statistik yang digunakan untuk menunjang analisis penelitian.

### **1.9.3. Sumber Data**

Penelitian ini disokong oleh data-data sekunder. Data-data sekunder sendiri didapat dari sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, berita-berita yang dirilis oleh CNN dalam jangka waktu November 2015, sekaligus dokumen negara seperti Undang-Undang yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat penulis dalam karya ilmiah ini.

#### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Oleh karena itu, penulis melakukan pengumpulan data dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis melalui studi kepustakaan (*library research*).

#### **1.9.5. Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga penulis turut serta menyertakan analisis kualitatif dengan model analisis konten. Adapun model interpretasi *content analysis* ini didefinisikan sebagai suatu penelitian/analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang bersifat yang bersifat mendalam atas suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa (Asfar & Nur, 2018). Penulis memilih model interpretasi *content analysis* ini karena dirasa memiliki keselarasan dengan tujuan penelitian yang menilik pemberitaan dan publikasi oleh media domestik dan media internasional. Kebutuhan dalam proses *content analysis* ini disokong oleh publikasi bahan penelitian terdokumentasi (buku, surat kabar, literatur, pita rekaman), selain itu ada kerangka teori tertentu yang digunakan untuk menerangkan dan sebagai metode pendekatan terhadap data, terakhir, peneliti juga memiliki kemampuan teknis untuk mengolah data-data yang dikumpulkan (Asfar & Nur, 2018).